

STRATEGI PEMBINAAN KARAKTER BERBASIS PANCASILA UNTUK REHABILITASI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG

PANCASILA-BASED CHARACTER BUILDING STRATEGIES FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN IN CLASS II SPECIAL CHILD DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN BANDUNG

Sri Sulistijaningsih, Juntika Nurihsan, Encep Syarief Nurdin

Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

Muhammad Sabri

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Ahmad Munawir*

Institut Agama Islam Negeri Palopo
Jalan Agatis Palopo 91911, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 Agustus 2024

Disetujui : 23 Februari 2025

Keywords:

character development;
rehabilitation of children
in care; special children's
rehabilitation center

Kata Kunci:

pembinaan karakter; rehabilitasi
anak binaan; lembaga pembinaan
khusus anak

***) Korespondensi:**

E-mail: ahmad_munawir@iainpalopo.ac.id

Abstract: this study aims to identify character building programs and analyze obstacles in implementing character building programs for the rehabilitation of children in the Bandung Class II Special Children's Rehabilitation Center. A qualitative descriptive approach was used to analyze Pancasila-based character building programs for the rehabilitation of children. The results of the study indicate that character development for the rehabilitation of juvenile offenders at the Bandung Class II Special Juvenile Rehabilitation Center is implemented through formal education programs as well as religious, intellectual, and national awareness character development programs, health, sports and arts, law and society, and independence. The challenges faced in character development efforts for the rehabilitation of juvenile offenders at the Special Juvenile Correctional Facility Class II Bandung include limited facilities and infrastructure, insufficient collaboration with educational institutions and local governments, a shortage of qualified educators and trainers, inadequate facilities, insufficient funding allocation, and poorly structured supervision. Efforts to address these challenges in character development for children in the Special Children's Rehabilitation Center Class II Bandung can be achieved by improving human resource quality, enhancing facilities and infrastructure, optimizing budgets, fostering inter-institutional collaboration, and developing a more structured evaluation system.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan karakter sekaligus menganalisis kendala dalam pelaksanaan program pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif digunakan untuk menganalisis program pembinaan karakter berbasis Pancasila untuk rehabilitasi anak binaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dilaksanakan melalui program pendidikan formal sekaligus program pembinaan karakter religius, intelektual

dan wawasan kebangsaan, kesehatan, olahraga dan kesenian, hukum dan kemasyarakatan, serta kemandirian. Kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan pelatih yang berkualitas, fasilitas yang kurang memadai, minimnya alokasi dana, serta pengawasan yang kurang terstruktur. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pembinaan karakter anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi anggaran, sinergi antar lembaga, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur.

PENDAHULUAN

Krisis moral di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya angka kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana seperti kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kasus kriminal yang melibatkan anak-anak dan remaja dalam beberapa tahun terakhir (Jannah & Nurajawati, 2023). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 2 Bandung mempertegas bahwa jumlah anak binaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permasalahan tersebut mencerminkan lemahnya pondasi moral generasi muda saat ini, sehingga pendidikan karakter dengan berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila perlu direalisasikan.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang relevan untuk membangun karakter moral pada generasi muda. Nilai-nilai Pancasila mencakup Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pendidikan karakter, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Pembinaan karakter berbasis Pancasila di LPKA Kelas II Bandung menjadi langkah strategis untuk mengembalikan moral dan integritas anak binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.

Reformasi pendidikan yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dengan

fokus yang mulai beralih ke pemberdayaan siswa dan kurikulum yang lebih inklusif. Hal ini di sisi lain justru mengurangi perhatian pada pendidikan karakter yang berbasis Pancasila (Danugroho, 2022). Perubahan kebijakan pendidikan yang menghilangkan Pancasila sebagai mata pelajaran khusus telah mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral di kalangan remaja (Azlina, Maharani, & Baedowi, 2021; Yunita dkk., 2024). Pendidikan Pancasila yang sebelumnya menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan moral siswa, kini tidak lagi menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan formal (Baderiah & Munawir, 2024). Hal ini mengakibatkan banyak remaja kehilangan pedoman moral dan etika yang seharusnya diperoleh melalui pendidikan formal.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai upaya untuk meminimalisir degradasi moral yang terjadi di kalangan remaja. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter dan moral remaja (Subianto, 2013; Yoga, Suarmini, & Prabowo, 2015). Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif (Munawir dkk., 2024). Pendidikan karakter berbasis Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi muda yang bermoral sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

LPKA Kelas II Bandung telah mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam pelaksanaan program binaan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan menyatakan

bahwa program pembinaan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian anak binaan agar dapat menjadi individu yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kajian ini mendeskripsikan pelaksanaan program dalam pembinaan karakter berbasis Pancasila di LPKA Kelas II Bandung. Fokus kajian meliputi berbagai aspek diantaranya yaitu pendidikan formal serta program pembinaan yang mencakup pembinaan karakter religius, intelektual dan wawasan kebangsaan, kesehatan, olahraga dan kesenian, hukum dan kemasyarakatan, serta kemandirian. Kajian ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan sekaligus upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi pembinaan karakter berbasis Pancasila pada anak binaan di LPKA Kelas II Bandung. Data kualitatif dikumpulkan melalui beberapa teknik diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan di LPKA Kelas II Bandung yaitu Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan, Kepala Seksi Registrasi, staf Seksi Pembinaan, wali pemasyarakatan, staf keamanan, dan anak binaan. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembinaan yang berlangsung di LPKA Kelas II Bandung secara langsung, sedangkan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan sekaligus menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan program pembinaan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan hingga merangkum data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk mempermudah dalam memahami topik bahasan. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data yang telah dianalisis. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang dilakukan dengan verifikasi data dari berbagai sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembinaan Karakter untuk Rehabilitasi Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandung

Pembinaan karakter berbasis Pancasila telah dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandung melalui berbagai program yang terstruktur dan sistematis. Program-program tersebut mencakup pendidikan formal, pembinaan karakter religius, intelektual dan wawasan kebangsaan, kesehatan, olahraga dan kesenian, hukum dan kemasyarakatan, serta kemandirian. Pembinaan adalah proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, serta kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Madani, 2021). Program pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif dapat membantu anak binaan untuk melakukan introspeksi diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara (Irawan, Hambali, & Arsetyo, 2022; Patty, Hehanussa, & Wadjo, 2022). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter warga binaan dapat menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik setelah lepas dari masa tahanan (Utami, 2023). Pendekatan yang holistik ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak binaan selama masa rehabilitasi.

Program pendidikan formal bertujuan untuk memastikan anak binaan tetap memperoleh hak pendidikan meskipun berada dalam masa rehabilitasi. LPKA Kelas II Bandung bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung untuk menyelenggarakan program pendidikan formal bagi anak binaan. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung memungkinkan anak binaan untuk terus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Program ini mencakup pendidikan setara SMK dan SMP Terbuka, serta program kejar paket A, B, dan C. Jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan formal setara SMK sebanyak 50 orang, SMP Terbuka sebanyak 30 orang, kejar paket A sebanyak 20 orang, kejar paket B sebanyak 25 orang, serta kejar paket C sebanyak 15 orang. Pendidikan di LPKA harus diupayakan secara optimal untuk mendukung rehabilitasi anak binaan (Sadat & Permatasari, 2023). Anak binaan yang mengikuti program ini merasa

terbantu karena dapat melanjutkan pendidikan meskipun berada dalam lingkungan pembinaan. Pendidikan formal sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan (Irawan, Hambali, & Arsetyo, 2022; Patty, Hehanussa, & Wadjo, 2022). Pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk merehabilitasi sekaligus mempersiapkan anak binaan untuk reintegrasi ke masyarakat.

Program pembinaan karakter religius dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Bandung dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan moral dan spiritual anak binaan. Program ini mencakup kegiatan keagamaan seperti ceramah, pengajian rutin, dan pendidikan pesantren bagi anak binaan yang beragama Islam serta kegiatan keagamaan lain yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh anak binaan. Program pesantren Miftakhul Jannah serta kegiatan pembinaan mental rohani yang melibatkan berbagai yayasan dan instansi keagamaan diselenggarakan untuk membentuk karakter religius anak binaan. Jumlah anak binaan yang mengikuti program pesantren sebanyak 60 orang, sedangkan anak binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan mental rohani berjumlah 80 orang. Program pembinaan karakter religius bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan karakter religius di LPKA Kelas II Bandung dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektualitas, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani anak binaan. Pembinaan karakter religius berbasis Pancasila merupakan pendekatan yang efektif dalam rehabilitasi anak binaan (Enggarsasi, 2013; Nurlela, 2020). Pembinaan karakter religius melalui kegiatan harian dan temporer dapat membentuk watak, sikap, dan perilaku individu agar menjadi lebih baik. Pembinaan karakter religius berbasis Pancasila merupakan pendekatan yang efektif dalam rehabilitasi anak binaan. Pendekatan berbasis pendidikan akhlak dan keterampilan sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi anak binaan di lembaga pemasyarakatan (Sambas, Syawali, & Suhardiman, 2016). Pembinaan karakter religius yang melibatkan kegiatan keagamaan

seperti pengajian, sholat berjamaah, dan ceramah keagamaan telah terbukti efektif dalam meningkatkan moral anak binaan.

Program pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan dikembangkan melalui kursus bahasa Inggris, pelatihan menulis artikel, pendidikan wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan dan latihan baris-berbaris. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan dilakukan melalui kegiatan kepramukaan, pelatihan kepemimpinan, dan upacara bendera. Jumlah anak binaan yang mengikuti kegiatan kepramukaan sebanyak 40 orang, pelatihan kepemimpinan sebanyak 35 orang, dan upacara bendera sebanyak 70 orang. Program pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Kegiatan kepramukaan dapat meningkatkan keterampilan sosial serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan (Rahmatiani, 2021). Negara dan masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung program pembinaan di LPKA (Krisna, Fitriani, & Asyiah, 2024; Salas, 2021). Kegiatan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan di LPKA Kelas II Bandung berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari anak binaan. Kegiatan kepramukaan dapat memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk mengembangkan karakter kepemimpinan yang sangat penting untuk kehidupan di masa mendatang.

Program pembinaan kesehatan mencakup bimbingan psikologis dan psikiatri serta pembinaan kader kesehatan. Bimbingan psikologis dan psikiatri yang diberikan di LPKA Kelas II Bandung bertujuan untuk mengatasi masalah mental dan emosional yang sering dialami oleh anak binaan. Jumlah anak binaan yang mengikuti bimbingan psikologis sebanyak 30 orang, bimbingan psikiatri sebanyak 20 orang, serta kader kesehatan sebanyak 25 orang. Bimbingan psikologis yang terstruktur dapat membantu anak binaan mengatasi kecemasan, depresi, dan masalah perilaku lainnya (Irawan, Hambali, & Arsetyo, 2022). Anak binaan yang memperoleh bimbingan psikologis dan psikiatri lebih mampu bersyukur, memiliki perasaan positif terhadap kehidupan, serta cenderung untuk bertindak positif (Kusumastuti, 2020). Bimbingan psikologis dapat meningkatkan kualitas hidup anak binaan karena mampu

mengembangkan keterampilan *coping* yang efektif (Rahmatiani, 2021). Bimbingan psikologis terbukti efektif dalam membantu anak binaan mengatasi kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang sering dialami.

Program kader kesehatan mencakup pelatihan untuk kesehatan reproduksi serta wawasan mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dapat memberikan pengetahuan bagi anak binaan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik. Pelatihan kader kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak binaan dalam menjaga kesehatan sekaligus mampu menciptakan lingkungan LPKA yang lebih sehat (Sutra & Octavianny, 2023). Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Magelang menunjukkan efektivitas dalam rehabilitasi sosial dan medis bagi warga binaan pengguna narkotika yang dapat dilihat dari perolehan skor dengan persentase 78,55% untuk rehabilitasi medis dan 76,88% untuk pelatihan kerja (Parlindungan, 2023). Program pembinaan kesehatan bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik dan mental anak binaan.

Program pembinaan olahraga dan kesenian dilaksanakan melalui senam pagi, futsal, badminton, serta kegiatan kesenian seperti *drumband* dan musik. Program ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak binaan. Jumlah anak binaan yang mengikuti kegiatan senam pagi sebanyak 50 orang, futsal sebanyak 40 orang, badminton sebanyak 30 orang, *drumband* sebanyak 20 orang, dan musik sebanyak 25 orang. Kegiatan olahraga seperti senam pagi, futsal, dan badminton telah membantu anak binaan meningkatkan kebugaran fisik sedangkan kegiatan kesenian seperti *drumband* dan musik dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni. Pembinaan olahraga dan kesenian merupakan komponen penting dalam rehabilitasi anak binaan (Arifai, 2021; Dewi, 2023; Dwiantoro & Subroto, 2023; Fitriani, 2023; Siwu, 2006). Program olahraga yang melibatkan peserta didik dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi serta mampu mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan (Lumintuarso, 2013). Pola pembinaan yang mencakup olahraga dan kesenian dapat membantu anak binaan mengembangkan bakat dan keterampilan yang

dimiliki (Niwanda, Pitoewas, & Halim, 2019). Olahraga dan kesenian menjadi sarana bagi anak binaan untuk menyalurkan energi dan emosi secara positif agar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan sikap disiplin.

Program pembinaan hukum dan kemasyarakatan melibatkan partisipasi anak binaan dalam kegiatan di luar LPKA melalui program asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pelepasan bersyarat. Program pembinaan hukum dan kemasyarakatan mencakup penyuluhan hukum dan kegiatan bantuan hukum yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Jumlah anak binaan yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sebanyak 30 orang, sedangkan kegiatan bantuan hukum diikuti oleh 15 anak binaan. Kegiatan penyuluhan hukum telah membantu anak binaan dalam memahami hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai seorang warga negara. Penyuluhan hukum yang inklusif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum tentang hak yang dimiliki agar tidak merasa terdiskriminasi (Danugroho, 2022). Program bantuan hukum juga memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak binaan untuk menghadapi masalah hukum yang sedang dialami (Prema, Ruba'i, & Aprilianda, 2019). Bantuan hukum gratis yang diberikan kepada warga binaan dapat membantu dalam memahami proses hukum yang dihadapi sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang adil (Arviani dkk., 2015; Fajriando, 2020). Program pembinaan hukum dan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak binaan mengenai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Program kemandirian mencakup pengembangan keterampilan menjahit, teknisi motor dan mobil, cara mengurus taman, budidaya perikanan, peternakan, serta pelatihan servis *handphone*. Jumlah anak binaan yang mengikuti kegiatan menjahit sebanyak 20 orang, beternak sebanyak 15 orang, montir sebanyak 10 orang, serta keterampilan lainnya sebanyak 25 orang. Pembinaan kemandirian merupakan komponen penting dalam rehabilitasi anak binaan. Program

ini bertujuan untuk membekali anak binaan dengan keterampilan praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembinaan kemandirian yang melibatkan pelatihan keterampilan seperti menjahit, bertani, dan membuat kerajinan tangan dari barang bekas dapat memberikan bekal yang berguna bagi anak binaan setelah keluar dari LPKA (Asandi, 2017; Bakri, 2012; Shidarta, 2022). Pembinaan kemandirian yang terstruktur dan sistematis dapat membantu anak binaan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri (Ayun, 2021; Siddiq, 2015; Saputera dkk., 2020). LPKA Kelas II Bandung telah mengimplementasikan program pembinaan secara komprehensif dan terstruktur. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek yang penting untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak binaan ke dalam masyarakat.

Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pembinaan Karakter untuk Rehabilitasi Anak Binaan di LPKA Kelas II Bandung

Program pembinaan karakter berbasis Pancasila telah diterapkan di LPKA Kelas II Bandung dengan tujuan meningkatkan kualitas moral, sosial, dan keterampilan anak binaan. Penyelenggaraan program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan di LPKA Kelas II Bandung yaitu keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Peran negara dan masyarakat sangat penting dalam mendukung program pendidikan karakter di LPKA agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar (Hartono, 2019). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga swasta dan pemerintah sekaligus melakukan optimalisasi pada sumber daya yang ada.

Keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan pelatih yang berkualitas dalam program pembinaan menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Penyelenggaraan program pembinaan membutuhkan pendampingan secara intensif baik dalam pembinaan karakter religius, pendidikan formal, maupun pelatihan keterampilan. Jumlah staf yang tersedia di LPKA Kelas II Bandung tidak memadai untuk menangani jumlah anak

binaan yang terus meningkat. Keterbatasan staf akan menghambat optimalisasi pelaksanaan program yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan secara intensif (Supriyanto, Ramdhani, & Rahmadan, 2015). Keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas staf dapat mempengaruhi kualitas pembinaan yang diberikan. Staf di LPKA Kelas II Bandung banyak yang tidak memperoleh pelatihan khusus dalam menangani anak-anak dengan latar belakang masalah hukum, sehingga sangat mempengaruhi efektivitas dalam proses pembinaan karakter.

Fasilitas yang tersedia di LPKA Kelas II Bandung hanya cukup untuk kebutuhan dasar sehingga dinilai belum memadai untuk mendukung program pembinaan secara komprehensif. Program pembinaan seperti olahraga, kesenian, dan keterampilan membutuhkan ruang yang cukup besar dan fasilitas yang lebih lengkap agar dapat berjalan dengan optimal. Keterbatasan ruang akan menghambat aktivitas yang melibatkan banyak anak binaan, sehingga menurunkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan program (Dewi, 2023). Ketersediaan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang kelas untuk pendidikan formal, ruang ibadah untuk pembinaan karakter religius, dan peralatan untuk pelatihan keterampilan juga perlu diperhatikan. Program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa adanya fasilitas yang memadai.

Keterbatasan dalam pengalokasian dana untuk pelaksanaan program pembinaan juga menjadi faktor penghambat dalam pembentukan karakter anak binaan di LPKA Kelas II Bandung. Anggaran yang terbatas menghambat pembelian fasilitas pendukung, pelatihan tenaga pendidik, serta pembiayaan program-program yang membutuhkan biaya operasional tinggi. Program yang seharusnya dapat dilaksanakan secara intensif dan berkualitas, dalam praktiknya justru terhambat oleh masalah pembiayaan (Sadat & Permatasari, 2023). Program-program penting seperti pengadaan buku, bahan ajar, dan fasilitas pelatihan seringkali terkendala oleh keterbatasan dana yang tersedia.

Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya juga dapat menghambat pelaksanaan program untuk anak binaan. Koordinasi yang belum optimal membuat beberapa program kurang mendapatkan dukungan dari berbagai

instansi, meskipun LPKA Kelas II Bandung telah berupaya untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan. Kerjasama dengan sekolah-sekolah lokal seringkali terhambat oleh perbedaan kebijakan atau keterbatasan waktu dan sumber daya. Kurangnya pengawasan dan evaluasi program juga menjadi kendala tersendiri. Pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program pembinaan yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengawasan yang kurang optimal mengakibatkan kurangnya umpan balik yang konstruktif bagi anak binaan (Purnomo, Djatmika, & Aprilianda, 2022). Umpan balik pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri setiap anak binaan di LPKA Kelas II Bandung. Analisis ketercapaian program secara objektif dan berkelanjutan sangat sulit untuk dilakukan karena tidak adanya evaluasi yang terintegrasi dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung dapat diatasi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta jangkauan program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Dukungan eksternal dapat menunjang keberhasilan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Patty, Hehanussa, & Wadjo, 2022). Pembinaan karakter berbasis Pancasila di LPKA Kelas II Bandung memiliki potensi besar untuk membantu anak binaan menjadi individu yang beriman, berilmu, bertanggung jawab, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa setelah kembali ke masyarakat.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung membutuhkan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dengan berbagai pihak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi anggaran, sinergi antar lembaga, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih baik diperlukan agar program pembinaan dapat berjalan secara efektif serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi anak binaan. Solusi ini tidak hanya membantu mengatasi kendala yang dihadapi tetapi juga dapat memaksimalkan potensi yang ada di LPKA

Kelas II Bandung untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik dan siap reintegrasi ke masyarakat.

SIMPULAN

Pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung dilaksanakan melalui program pendidikan formal sekaligus program pembinaan di berbagai aspek diantaranya aspek religius, intelektual dan wawasan kebangsaan, kesehatan, olahraga dan kesenian, hukum dan kemasyarakatan, serta kemandirian. Kendala yang dihadapi dalam upaya pembinaan karakter untuk rehabilitasi anak binaan di LPKA Kelas II Bandung yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan pelatih yang berkualitas, fasilitas yang kurang memadai, minimnya alokasi dana, serta pengawasan yang kurang terstruktur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembinaan karakter anak binaan di LPKA Kelas II Bandung yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, optimalisasi anggaran, sinergi antar lembaga, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih baik. Langkah-langkah strategis dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandung dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi anak binaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifai. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kalabirang Law Journal*, 3(1), 34-46. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabirang268>
- Arviani, C. N., Fatony, A., Aditanyo, A., Valerian, D., Widigda, D. T., & Paladina, K. M. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 377-407.
- Asandi, T. L. A. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan:

- Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ayun, H. N. Q. (2021). Metode Dakwah Bi al Hikmah Ustaz Halim Ambiya pada Komunitas Tasawuf Underground Ciputat dalam Mengajak Anak Punk Berhijrah. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azlina, N., Maharani, A., & Baedowi, M. S. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pendidikan sebagai Upaya Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Indonesian Journal of Instructional Technology*, 2(2), 39-52.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal 2023. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/>
- Baderiah & Munawir, A. (2024). Harmonizing Local Wisdom with Islamic Values: A Guide to Character Education Development. *International Journal of Asian Education*, 5(1), 63-75.
- Bakri. (2012). Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tomohon. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Danugroho, A. (2022). Pendidikan dalam Kacamata Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Dewi, J. Y. (2023). Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), 139-155.
- Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasarakatan melalui Model Pembinaan di LPKA. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 5514-5524.
- Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157-168.
- Fajriando, H. (2020). Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang. *Jurnal HAM*, 11(1), 55-66.
- Fitriani, R. E. (2023). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 79-92.
- Hartono. (2019). Konsep Pembinaan Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96.
- Irawan, A., Hambali, M. A., & Arsetyo, Y. I. C. (2022). Kedudukan dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan bagi Anak Berhadapan Hukum sebagai Pelaku. *Journal Equitable*, 7(2), 125-156. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4119>
- Jannah, A., & Nurajawati, R. (2023). Peran Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(5), 579-586.
- Krisna, L. A., Fitriani, R., & Asyiah, N. (2024). Pendampingan kepada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LKPS) dalam Membina Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(1), 1172-1182.
- Kusumastuti, W. (2020). Efektivitas Psikoterapi Profetik terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Warga Binaan Pemasarakatan. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 2(1), 94-111.
- Lumintuarso, R. (2013). Pembinaan Multilateral bagi Atlet Pemula. Yogyakarta: UNY Press.
- Madani, H. (2021). Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran menurut Rasulullah SAW. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 145-156.
- Munawir, A., Yaumi, M., Sulaiman, U., & Rahman, U. (2024). Integrating Local Wisdom in Elementary Education: Evaluating the Impact of Thematic Curriculum in Palopo City. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 9(1), 139-149.
- Niwanda, S., Pitoewas, B., & Halim, A. (2019). Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 7(2), 132-141.
- Nurlela, K. (2020). Representasi Civic Disposition melalui Pendekatan Moral pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

- Sukamiskin Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 34-43.
- Parlindungan, F. M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pattimura: Legal Journal*, 1(2), 101-123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). Pidana Penjara untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 8-18.
- Rahmatiani, L. (2021). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. *Journal of Empowerment*, 2(1), 16-32. <https://doi.org/10.35194/je.v2i1.1264>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Sadat, T. C. A., & Permatasari, P. (2023). Implementasi Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 102-126.
- Salas, A. Y. (2021). Upaya Mengatasi Perlakuan Diskriminatif terhadap Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 331-342.
- Sambas, N., Syawali, H., & Suhardiman, E. D. (2016). Pendidikan Berbasis Budi Perkerti terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kls II Bandung. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 6(1), 565-576.
- Saputera, A. R. A., Sadu, Y., Putra, M. Y., & Susantin, J. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. *Jurnal Yustitia*, 21(2), 198-222. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.990>
- Shidarta, A. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Siwu, S. C. (2006). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pidana dan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Nakal di Blitar Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. *Yustika*, 9(1), 19-40.
- Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 41-49. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2015). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sutra, B. M., & Octavianny, A. (2023). Pemenuhan Hak Gizi dan Makanan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 6178-6193.
- Utami, N. S. B. (2023). Reformasi Penologi: Urgensi Penempatan dan Pembinaan bagi Narapidana Transgender di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 84-118.

Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 46-54.

Yunita, S., Manalu, A. E., Lubis, F. A., Cahyani,

N. F., & Ulan. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Krisis Moral pada Pelajar di Era Globalisasi. *Journal on Education*, 6(3), 17628-17634. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5664>